

EDISI : Selasa, 12 Februari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media:

KORAN BALI

Kategori:

KEKERASAN PEREMPUAN

Cegah Kekerasan, Libatkan Desa Pakraman

SINGARAJA - Desa pakraman akan turut dilibatkan dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Selain itu desa pakraman juga diharapkan turut berpartisipasi memberikan sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran bersifat norma dan etika yang menyimpang di masyarakat.

Usulan pelibatan komponen adat itu mencuat saat pembahasan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Buleleng, Senin (11/2). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus I DPRD Buleleng Made Mangku Ariawan.

Dalam pembahasan tersebut, Tim Ahli DPRD Buleleng Wayan Rideng menganggap, desa pakraman perlu dilibatkan dalam langkah pencegahan serta penanganan non-litigasi. Sebab eksistensi lembaga adat di masyarakat Bali sangat kuat. Sehingga

ga instrument-instrumen adat cukup mengikat masyarakat.

Menurut Rideng nantinya desa pakraman diharapkan turut menyusun awig-awig atau perarem untuk langkah pencegahan serta penanganan. Hal-hal yang tak diatur dalam hukum positif, baik itu dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat diatur dalam perarem.

"Hal-hal yang bersifat etika dan moral, bisa diselesaikan lewat desa pakraman. Misalnya yang ringan-ringan seperti mengintip, itu bagaimana mau dilaporkan. Makanya kami harap ini bisa diselesaikan lewat proses non-litigasi di desa pakraman," jelas Rideng.

Sementara hal-hal yang telah diatur dalam hukum positif, akan diselesaikan lewat proses hukum. Sehingga desa pakraman tidak mengambil alih tugas dan fungsi aparat penegak hukum.

"Kalau misalnya sudah pencabulan, itu tidak bisa lewat non-litigasi. Penyelesaiannya ya lewat jalur pidana. Intinya tidak semua diselesaikan lewat adat. Hanya mengatur soal norma dan etika saja," ungkapnya. Pelibatan

komponen adat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diyakini bisa berjalan dengan efektif. Mengingat masyarakat Bali juga terikat dengan sejumlah aturan yang diterbitkan oleh desa pakraman. (eps/gup)

Media: Radar Bali

Kategori: RTH

RTH BUNG KARNO



CETAKAN:
Pengerjaan patung Bung Karno sementara dihentikan.

DINAS PERKIMTA BULELENG FOR RADAR BALI

Badan Patung Dititip di Jogjakarta

SINGARAJA – Badan patung Bung Karno yang hingga kini masih belum tuntas dikerjakan, masih dititip pada perajin di Jogjakarta. Saat ini masih bagian badan atas dan tangan saja yang belum dikerjakan. Namun karena batas waktu kontrak sudah habis, maka seluruh pekerjaan pembuatan patung terpaksa dihentikan.

Sebenarnya perajin yang dikontrak oleh pemenang tender pembangunan RTH Bung Karno, sudah membuat cetakan patung. Cetakan itu dibuat dengan bahan dasar fiber. Selanjutnya pematung tinggal melakukan cor logam dan pencetakan, sehingga bagian patung tuntas.

Namun proses pengecoran dan pencetakan logam, membutuhkan waktu yang cukup lama. Memakan waktu sekitar tiga pekan. Alhasil cetakan patung dibiarkan di Jogjakarta, dan dititip dengan berita acara. "Sementara ya kami titip di Jogjakarta dulu. Sudah dengan beritanya. Bagian-bagian yang sudah selesai, termasuk kepingannya sekali pun, sudah semuanya sampai dan kami simpan di RTH," jelas Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/2).

Khusus untuk lanjutan pembuatan patung, Surattini mengaku masih melakukan kajian. Selanjutnya kajian itu akan disodorkan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pihaknya akan meminta fatwa, apakah pekerjaan bisa dilanjutkan dengan prosedur penunjukan langsung, atau harus dimulai dari nol.

"Sebab patungnya ini kan sudah setengah jadi. Kalau harus dimulai dari nol, seperti apa kebijakannya. Kalau boleh dilanjutkan, dasar kebijakannya bagaimana. Biar kami tidak salah melangkah. Sebab tumben ada masalah seperti ini," imbuhnya.

Kini pemerintah masih melakukan penghitungan total pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor pelaksana. Diperkirakan total pekerjaan baru selesai 49 persen saja. Dari total biaya pembangunan Rp 5,4 miliar, pemerintah baru membayar kontraktor sebanyak Rp 2,64 miliar. Pemerintah juga akan menagih denda keterlambatan proyek sebesar Rp 270 juta yang harus dibayar kontraktor, serta mencairkan biaya jaminan proyek. (eps/gup)

Nama Media:

Radar Bali

Kategori:

Karya Tulis Ilmiah

Tiga Siswa SMAN 1 Singaraja Ciptakan Alat Pendeteksi Kekeringan

Lebih Singkat dan Efisien, Monitoring Kadar Air Tanah Berbasis SMS

Siswa di SMAN 1 Singaraja membuat alat pendeteksi kekeringan. Alat tersebut berhasil meraih predikat juara III dalam ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Udayana, pada Sabtu (9/2) lalu.

EKA PRASETYA, Singaraja

KETIGA siswa itu adalah Felicia Michelle, Nadia Pratiwi, dan Ari Candra. Mereka membuat karya ilmiah dengan judul "Monitoring kadar air tanah berbasis SMS sebagai Indikasi Peringatan Dini Bencana Kekeringan". Selain itu mereka juga membuat sebuah alat prototype yang bisa mendeteksi kekeringan.

Menurut salah seorang siswa, Felicia Michelle, alat itu dibuat menyusul meluasnya fenomena kekeringan di Indonesia, tak terkecuali di Buleleng. Sebenarnya kini sudah ada alat mendeteksi kondisi air tanah, hanya saja membutuhkan proses yang lama dan tak efisien. Mereka pun berinisiatif membuat sebuah alat yang bisa beroperasi lebih singkat dan efisien. "Kami harap alat ini bisa membantu BMKG untuk memonitoring bencana kekeringan. Tanah tinggal diukur kadar airnya, nanti hasilnya bisa langsung dilihat lewat SMS," kata Felicia saat ditemui di SMAN 1 Singaraja, Senin (11/2).

Secara garis besar, alat tersebut terdiri dari sejumlah sensor. Energinya menggunakan panel surya sehingga ramah lingkungan. Nantinya hasil pembacaan sensor, akan masuk lewat pesan singkat di ponsel. Entah itu terjadi kekeringan atau tidak. Apabila terjadi kekeringan, pemerintah



SMAN 1 SINGARAJA FOR RADAR BALI

TIM: Siswa dan siswi SMAN 1 Singaraja kerap membukukan prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

pun diharapkan bisa mengambil langkah-langkah penanganan sehingga tak meluas.

Selain itu, sejumlah siswa di SMAN 1 Singaraja juga meraih prestasi. Yakni Kadek Edy Su-

karma Siswa Kelas XI MIPA1 yang meraih juara I Lomba Cerdas Cermat Tingkat Provinsi di Undiksha Singaraja. Ada pula I Wayan Nugraha Satya Ananda yang meraih Juara I Lomba

Giosfere Competition di Bidang Kebumihan, untuk regional Jatim, Bali dan NTB. Serta Alycia Devy Savitri yang meraih juara III bidang Geografi pada lomba yang sama. Sedangkan di bidang lomba Esai Tingkat Nasional yang diselenggarakan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Arnold Keane meraih juara III. Kemudian dalam lomba Robot Time Follower, yang digelar di Universitas Udayana, Smansa mengirim dua tim andalannya. Dimana tim yang dipimpin oleh Marvin Adinata mampu meraih juara II dan Tim dari Ketut Trisma Cadu Palguna

meraih Juara III.

Kepala SMAN 1 Singaraja Putu Eka Wilantara mengapresiasi prestasi yang diraih anak didiknya. Menurutnya semua siswa termotivasi untuk ikut mengharumkan nama sekolah dalam berbagai ajang lomba baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. (* / gup)

Nama Media:

Radar Bali

Kategori:

Perseroan

Pansus Pesimistis Perda BPR Tuntas

Terkendala Naskah Akademik

SINGARAJA - Pansus III DPRD Buleleng yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai perubahan status BPR Buleleng 45 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah, pesimistis aturan itu bisa selesai pada masa sidang pertama Tahun 2019. Penyebabnya, naskah akademik ranperda belum juga diserahkan oleh eksekutif.

Pansus disebut sudah melakukan komparasi ke sejumlah daerah yang memiliki aturan mengenai perseroan daerah. Seperti Jombang dan Bangli. Di Kabupaten Jombang misalnya, perda sudah ditetapkan dan telah berlaku. Perda itu memiliki



EKA PRASETYA/RADAR BALI

landasan naskah akademik yang kuat. Berbeda dengan Kabupaten Bangli. "Di Bangli, perdanya (BPR jadi PT) sudah jadi. Tapi naskah akademiknya tidak ada. Sehingga ditegur kementerian," kata Ketua Pansus III DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng, Senin (11/2). "Harus

sulkan ranperda tentang BUMD kepada Kemendagri. Usulan itu dilampiri dengan analisa, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan daerah. Apabila telah mendapat izin dari pejabat kementerian, baru dilanjutkan dengan pembahasan. "Ranperda yang diajukan eksekutif ini sudah ada persetujuan menteri atau belum? Naskah akademiknya juga masih kami tunggu, sampai sekarang belum kami terima," ujarnya.

Pria yang juga politisi Partai Golkar itu menyatakan, naskah akademik mutlak dibutuhkan. Sebab perubahan status BPR Buleleng 45 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah, membutuhkan banyak landasan hukum. Selain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, juga dibutuhkan lan-

Di Bangli, perdanya (BPR jadi PT) sudah jadi. Tapi, naskah akademiknya tidak ada. Sehingga ditegur kementerian."

PUTU TIRTA ADNYANA
Ketua Pansus III DPRD Buleleng

ada naskah akademiknya dulu. Nah di Buleleng apa mau seperti itu? Buat apa membahas perda tanpa naskah akademik, tapi dua tahun kemudian akhirnya harus direvisi," imbuhnya.

Menurut Tirta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala daerah wajib mengu-

dasar yang terkait UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Perseroan Terbatas. Apakah perda bisa tuntas pada masa sidang saat ini? Ditanya demikian, Tirta Adnyana mengaku pesimistis. "Saya belum bisa, karena naskah akademik belum ada. pembahasannya tidak akan optimal. Tapi ya kembali lagi ke kemauan daerah. Kalau naskah akademik ada, bisa segera kita bahas. Tapi naskah akademik itu kan perlu penelitian biar dapat kajian yang komprehensif," tukas Tirta.

Sekadar diketahui, Pemkab Buleleng mengajukan perubahan status BPR Buleleng 45 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah. Perubahan status itu akan mempermudah manuver perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha. (eps/gup)

Nama Media:

RADAR BALI

Kategori:

KAWAS

30 Hari Penuh, Vaksinasi Masal

SINGARAJA – Kasus rabies di Buleleng terbilang cukup tinggi. Untuk itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Bali akan melakukan vaksinasi masal selama 30 hari non-stop di Gumi Panji Sakti. Hal tersebut diungkapkan Kadis PKH Bali Wayan Mardiana di Singaraja kemarin (11/2).

“Kami harap saat vaksinasi masal dilangsungkan, pemerintah kabupaten dan aparat desa bisa menginstruksikan warga mengikat hewannya. Sehingga cakupan bisa dioptimalkan,” kata Mardiana saat ditemui di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, pagi ke-

PENCEGAHAN: Maret nanti, vaksinasi masal untuk hewan penyebar rabies akan dilangsungkan di seluruh Bali termasuk di Buleleng.

marin. Vaksinasi masal rencananya akan dilangsungkan pada Maret mendatang dan dilaksanakan selama 30 hari penuh di seluruh Bali. Untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi, Dinas PKH Bali pun telah menggandeng Balai Besar Veteriner dan Komisi Ahli.

Menurut Mardiana kini populasi hewan penyebar rabies di Buleleng diperkirakan mencapai 91 ribu ekor. Saat vaksinasi masal nanti, diharapkan ada 95 persen populasi yang divaksinasi. Artinya ada 86 ribu ekor yang harus di vaksin. Sementara hewan-hewan yang luput dari vaksinasi, namun menunjukkan gejala terjangkit rabies, tak menutup kemungkinan akan dieleminasi.

Di sisi lain Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjitra mengakui kasus rabies

di Kabupaten Buleleng masih menonjol. Padahal pemerintah telah melakukan vaksinasi masal sejak 2008 silam hingga tahun 2018 lalu. Namun masih ada saja kasus rabies yang belum tertangani. Mirisnya lagi, di Buleleng ada dua orang yang meninggal karena terjangkit rabies. Selain itu ada 17 orang lainnya yang sempat menjadi korban gigitan anjing positif rabies, namun berhasil selamat setelah mendapat penanganan yang cepat dan diberikan serum anti rabies. “Ini kasus rabies di Buleleng masih zona merah. Apalagi ada 32 desa yang sekarang masih masuk daerah positif rabies. Daerah-daerah ini yang kami genjot vaksinasinya, mudah-mudahan bisa mendekati angka 100 persen,” tukas dia. (eps/gup)

